

Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Boro Kecamatan Sanggar



Rosi Wahyuningsih^(1*) Nurul Hayat⁽²⁾ Ibrahim Zakariah⁽³⁾

^(1*) Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

^(2,3) Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

Penulis Korespondensi: Rosi Wahyuningsih
rosiwahyuningsih07@gmail.com

	Abstrak
Kata Kunci: efektivitas; efisiensi; pengelolaan keuangan BUMDes	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Boro, Kecamatan Sanggar.
Pernyataan Penulis: Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.	Desain Penelitian dan Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada lima informan utama, yaitu Ketua BUMDes, staf administrasi/keuangan, Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan masyarakat.
Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.	Hasil dan Pembahasan: Pengelolaan keuangan BUMDes telah diupayakan melalui musyawarah desa dan pelaksanaan program prioritas seperti usaha simpan pinjam dan penyediaan kebutuhan pokok. Namun, efektivitasnya belum optimal karena perencanaan masih bersifat administratif, analisis usaha belum maksimal, serta manfaat program belum merata ke seluruh masyarakat. Dari sisi efisiensi, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan risiko kesalahan dan keterlambatan laporan. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi menjadi hambatan utama. Upaya perbaikan yang disarankan meliputi penyusunan rencana keuangan berbasis analisis usaha, peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan, pengawasan anggaran yang lebih ketat, serta pemanfaatan sistem digital seperti aplikasi akuntansi sederhana atau Siskeudes.
	Kesimpulan: Memberikan panduan untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes melalui pelatihan SDM, digitalisasi, dan transparansi serta memperkaya literatur dengan menyoroti tantangan nyata yang dihadapi BUMDes di lapangan.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional. Sebagai badan usaha yang dibentuk oleh desa dan dikelola oleh masyarakat, BUMDes memiliki peran ganda: sebagai lembaga ekonomi dan sebagai alat pemberdayaan sosial. Agar fungsi ini berjalan optimal, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi syarat mutlak. Menurut (Amelia et al., 2024) dan (Jihan dkk, 2025), keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolanya dalam mengatur keuangan secara tepat guna, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Senada dengan itu, (Hardiani & Rifandi, 2023) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan dalam BUMDes

bukan hanya dilihat dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana dana desa mampu dikelola secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes mencerminkan sejauh mana kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan rencana kerja, sasaran yang ditetapkan, dan hasil yang diperoleh. Efisiensi, di sisi lain, berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal. Dua konsep ini tidak dapat dipisahkan, karena efektivitas tanpa efisiensi akan menghasilkan pemborosan, dan efisiensi tanpa efektivitas akan kehilangan arah. Dalam konteks BUMDes, efektivitas dan efisiensi ini dapat dicapai melalui perencanaan keuangan yang matang, pelaksanaan anggaran yang disiplin, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala (Tazam & Safitri, 2024). Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang wajib diterapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Di era digital seperti saat ini, sistem keuangan berbasis digital seperti aplikasi akuntansi desa atau Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) seharusnya menjadi alat bantu penting dalam menciptakan efisiensi kerja. Menurut (Kusumawati Nugrahini et al., 2025), penggunaan teknologi dalam tata kelola keuangan desa terbukti mampu menekan biaya operasional, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan akurasi data. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh (Salman, 2024), banyak desa yang belum dapat mengoptimalkan teknologi akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur pendukung yang belum memadai.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada BUMDes di Desa Boro Kecamatan Sanggar, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes Boro masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah yang tampak nyata adalah pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan belum mengacu pada standar akuntansi sederhana, sehingga rawan terjadi kesalahan dan kurang akuntabel. Selain itu, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak tepat waktu dan minim evaluasi berkala. Ketidakteraturan dalam pelaporan juga mengakibatkan kesulitan dalam memantau arus kas usaha dan melakukan pengambilan keputusan berbasis data. Masalah lainnya adalah belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi pengelola dan keuangan BUMDes, sehingga memicu potensi konflik kepentingan dan penyimpangan anggaran. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes, serta kurang maksimalnya perputaran modal dalam unit usaha yang dijalankan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi aktual pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Boro, dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini tidak hanya penting untuk menemukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh BUMDes, tetapi juga untuk merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan secara langsung dalam perbaikan tata kelola keuangan desa. Sebagaimana dijelaskan oleh (Suharyanto et al. 2024), tata kelola keuangan yang baik akan mendorong terciptanya BUMDes yang mandiri, transparan, dan mampu bersaing dalam dinamika ekonomi lokal. Selain itu, (Rijani et al., 2024) menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi mencakup keseluruhan proses yang mendukung penggunaan sumber daya secara optimal demi mencapai tujuan pembangunan desa. Selain berbagai masalah tersebut terjadi kesenjangan temuan dari beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh (Yulianti dan Mahmud, 2021) menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes yang efektif dan efisien dapat mendorong peningkatan pendapatan desa secara signifikan di wilayah penelitian mereka. Begitu juga dengan studi dari (Anwar et al, 2025) yang menemukan bahwa pelatihan keuangan dan digitalisasi sistem pencatatan mendorong profesionalisme pengelolaan BUMDes. Namun, hasil-hasil tersebut belum sepenuhnya tercermin pada konteks Desa Boro. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara keberhasilan yang ditemukan dalam studi sebelumnya dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menelaah lebih dalam sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa

Boro telah diterapkan, serta apa saja faktor penghambat yang perlu diatasi agar tujuan pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes dapat tercapai secara optimal, termasuk transisi penggunaan metode keuangan yang bersifat digitalisasi (Nuraini & Mahmud, 2025).

Berdasarkan Latarbelakang Permasalahan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Boro Kecamatan Sanggar". Dari berbagai kajian sebelumnya, mayoritas penelitian lebih banyak berfokus pada peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa atau aspek manajerial kelembagaan, namun belum banyak yang secara khusus menyoroti efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes dalam konteks operasionalnya secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memusatkan perhatian pada bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Boro dilaksanakan secara riil, sejauh mana keuangan BUMDes dikelola secara efisien dalam pengeluaran dan efektif dalam pencapaian tujuan usaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali hambatan yang dihadapi dalam praktik pengelolaan keuangan serta mencari solusi strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes secara berkelanjutan dan akuntabel.

Ulasan Literatur

Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan keuangan BUMDes mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan atas aktivitas keuangan yang dilakukan oleh badan usaha desa. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan usaha serta akuntabilitas penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan usaha. Menurut (Haris dan Muhtar, 2022), sistem pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam konteks BUMDes, pengelolaan keuangan bukan hanya menyangkut pencatatan kas masuk dan keluar, tetapi juga menyangkut pengambilan keputusan keuangan berdasarkan data dan informasi yang valid. BUMDes sebagai entitas usaha desa dituntut untuk menjalankan sistem keuangan yang profesional meskipun berada dalam lingkungan non-korporat. Oleh karena itu, peran bendahara dan pengurus keuangan menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dapat dipertanggungjawabkan. Jika sistem keuangan lemah, maka risiko penyalahgunaan dana, konflik internal, dan kegagalan usaha menjadi sangat tinggi (Yulianti & Mahmud, 2021).

Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Efektivitas merujuk pada ukuran seberapa jauh suatu kegiatan atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini berfokus pada hasil akhir, bukan sekadar proses atau sumber daya yang digunakan. Suatu kegiatan dianggap efektif jika capaiannya sesuai atau bahkan melebihi target yang direncanakan. Seperti yang dijelaskan oleh (Mahmudi, 2016), efektivitas merupakan "tingkat pencapaian hasil (output) yang diinginkan dari suatu kegiatan atau program." Oleh karena itu, efektivitas menekankan pentingnya keberhasilan optimal dalam mencapai sasaran, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks pengelolaan keuangan, efektivitas diartikan sebagai kemampuan sistem keuangan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara tepat dan sesuai rencana. Pengelolaan keuangan yang efektif berarti setiap tahapan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dilakukan dengan terarah untuk mencapai hasil yang optimal. Dana yang dikelola secara efektif menunjukkan bahwa sumber daya yang ada digunakan sesuai prioritas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi organisasi atau masyarakat yang dilayani. Menurut (Renita et al., 2023), efektivitas pengelolaan keuangan publik dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti perbandingan antara realisasi hasil dengan target yang ditetapkan, kesesuaian penggunaan anggaran dengan program prioritas, manfaat atau dampak dari kegiatan, dan tingkat kepuasan stakeholder.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Secara umum, efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Konsep ini membandingkan antara input (sumber daya yang digunakan) dengan output (hasil yang dicapai). Menurut (Mahmudi, 2016), efisiensi adalah "perbandingan antara input dengan output, di mana suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output maksimal dengan input minimal." Dengan kata lain, efisiensi bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga tentang kualitas hasil yang dicapai dari setiap sumber daya yang digunakan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, efisiensi mencerminkan seberapa baik proses keuangan dijalankan dengan hemat, tepat guna, dan tanpa pemborosan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan atau tujuan keuangan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga memastikan alokasi dana sesuai prioritas dan memberikan hasil optimal. (Firmansyah Agung, 2022) mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan, antara lain rasio antara realisasi biaya dan anggaran yang tersedia, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta kemampuan untuk mengendalikan biaya dan menghindari pemborosan. Indikator-indikator ini menjadi landasan penting untuk menilai apakah keuangan dikelola secara efisien dan bertanggung jawab.

Desain Penelitian dan Metodologi

Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Boro. Pendekatan ini, menurut (Moleong, 2021), memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, proses, dan persepsi para pihak yang terlibat secara langsung, sehingga hasilnya tidak hanya berupa angka, tetapi juga pemahaman menyeluruh terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling karena BUMDes tersebut aktif beroperasi, memiliki sistem pengelolaan keuangan, dan terdapat upaya nyata dari pengelola untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Penelitian berlangsung selama satu bulan, dengan fokus pada koordinasi, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan, dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan informan kunci seperti Ketua BUMDes, staf keuangan, Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat, yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap proses keuangan. Wawancara terstruktur ini bertujuan menggali informasi spesifik terkait perencanaan, realisasi, dan efektivitas program. Sementara itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti mengamati langsung proses pencatatan, pelaporan, dan operasional harian. Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen dan arsip mencakup laporan keuangan BUMDes, buku kas, laporan unit usaha, APBDes, dan SOP pengelolaan keuangan. Dokumentasi ini berfungsi untuk memvalidasi informasi primer dan memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang diperbarui (Salman, 2024), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data (memilih dan memfokuskan data relevan), penyajian data (menyajikan temuan dalam bentuk narasi atau matriks), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria dari (Lincoln &

Guba, 1985) yang telah diadaptasi (Tazam & Safitri, 2024), yaitu: kredibilitas (melalui triangulasi sumber dan teknik), transferabilitas (dengan deskripsi yang rinci), dependabilitas (menjaga konsistensi proses penelitian), dan konfirmabilitas (memastikan objektivitas melalui dokumentasi data asli). Penggunaan teknik-teknik ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan akurat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan wawancara mendalam dengan lima informan utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes Desa Boro (Ketua BUMDes, staf administrasi/keuangan, Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan masyarakat), diperoleh gambaran bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan telah diupayakan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala. Secara umum, seluruh informan menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta keterbukaan terhadap perbaikan sistem. Temuan penelitian ini disajikan sesuai dengan rumusan masalah berikut:

Efektivitas Pengelolaan Keuangan BUMDes

Perencanaan keuangan BUMDes dilakukan setiap awal tahun melalui musyawarah bersama pemerintah desa. Ketua BUMDes menyatakan, *"Kami menyusun rencana keuangan setiap tahun, tapi masih sederhana, lebih banyak mengikuti format administrasi daripada analisis usaha."* Hal ini menandakan bahwa meskipun perencanaan dilakukan, aspek analisis kebutuhan dan proyeksi usaha belum maksimal.

Terkait penggunaan anggaran, Kepala Desa menyampaikan,

"Dana memang kami arahkan pada program prioritas seperti simpan pinjam dan penyediaan kebutuhan pokok. Manfaatnya sudah ada, meski belum merata ke seluruh masyarakat." Namun Ketua BPD menambahkan, *"Kadang ada pengeluaran mendadak di luar rencana, ini yang membuat anggaran tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal."*

Dalam hal ketercapaian target, Staf Administrasi menjelaskan,

"Unit usaha sudah jalan, tapi keuntungan belum stabil. Kadang modal yang ada terpakai untuk biaya lain, sehingga sulit berkembang." Sementara masyarakat menilai, *"BUMDes memang membantu, terutama pinjaman dengan bunga ringan, tapi belum semua warga merasakan manfaatnya."*

Secara umum, masyarakat memberi tanggapan positif, meski tetap ada kritik tentang transparansi. Perwakilan masyarakat menuturkan,

"Kami jarang tahu laporan keuangan secara jelas. Kalau bisa dipublikasikan rutin, masyarakat pasti lebih percaya."

Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDes

Dalam praktiknya, pengendalian biaya masih dilakukan secara manual. Staf Administrasi menjelaskan,

"Semua transaksi dicatat di buku kas, tapi ini rawan salah dan sering terlambat."

Ketua BUMDes menambahkan,

"Kami berusaha hemat, hanya keluarkan biaya untuk kebutuhan inti, tapi kadang tidak bisa dihindari pengeluaran tambahan."

Keselarasan antara perencanaan dan realisasi belum sepenuhnya tercapai. Ketua BPD menyebutkan,

"Ada selisih, terutama pada biaya operasional yang kadang lebih besar dari rencana."

Kepala Desa pun menilai bahwa,
"Sebagian modal yang seharusnya diputar untuk usaha terpakai untuk administrasi, sehingga kurang maksimal."

Pemanfaatan teknologi juga belum optimal. Staf Administrasi mengakui,
"Kami belum pakai aplikasi seperti Siskeudes secara penuh karena belum menguasai. Semua masih manual."

Masyarakat berharap adanya pembaruan sistem digital agar lebih efisien dan transparan.

Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan

Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Staf Administrasi mengungkapkan,

"Kami tidak punya latar belakang akuntansi, jadi laporan sering terlambat dan belum rapi."

Kepala Desa menambahkan,
"Infrastruktur masih minim, komputer dan internet terbatas, jadi sulit kalau mau pakai sistem digital penuh."

Dari sisi akuntabilitas, Ketua BPD menyatakan,
"Laporan keuangan jarang kami terima rutin, padahal itu penting untuk fungsi pengawasan."

Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat,
"Kurangnya keterbukaan bikin sebagian warga ragu pada pengelola BUMDes."

Upaya Perbaikan dan Strategi

Informan menyampaikan beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Ketua BUMDes menekankan,

"Ke depan kami ingin rencana keuangan lebih detail, tidak sekadar formalitas."

Ketua BPD mengusulkan,
"Harus ada skala prioritas pengeluaran dan pengawasan kas yang lebih ketat, supaya tidak boros."

Staf Administrasi menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM,
"Kalau ada pelatihan, kami siap ikut. Itu penting untuk laporan yang lebih baik."

Kepala Desa juga menegaskan dukungan,
"Kami siap fasilitasi pelatihan dan bantu sediakan sarana teknologi."

Sementara itu, masyarakat berharap ada perbaikan sistem digital. Perwakilan masyarakat menyampaikan,

"Kalau keuangan sudah dicatat pakai sistem komputer dan dilaporkan rutin, pasti lebih transparan dan masyarakat lebih percaya."

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes Desa Boro telah diupayakan, namun masih menghadapi kendala dalam aspek perencanaan berbasis analisis, pemanfaatan teknologi, kapasitas SDM, serta transparansi. Meski begitu, seluruh informan memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan sistem digital agar pengelolaan keuangan BUMDes menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Desa Boro sudah berjalan cukup baik, terutama melalui musyawarah desa dan manfaat unit simpan pinjam, namun efektivitas dan efisiensinya belum optimal karena perencanaan masih administratif, laporan kurang transparan, serta pencatatan masih manual. Hal ini sejalan dengan pandangan (Siagian, 2018) bahwa efektivitas menuntut tercapainya tujuan organisasi, sementara efisiensi terkait penggunaan sumber daya yang hemat. Temuan ini juga didukung penelitian (Setiawan et al. 2020) dan (Putri & Kurniawan, 2022) yang menegaskan bahwa keterbatasan SDM serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi menjadi hambatan utama BUMDes dalam mewujudkan tata kelola modern dan akuntabel. Hasil tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Kaitannya dengan Capaian Program

Efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes ditentukan oleh sejauh mana program yang disusun berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat nyata. Dalam kasus BUMDes Desa Boro, perencanaan keuangan memang sudah dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, namun pelaksanaannya masih belum efektif. Hal ini karena perencanaan tersebut lebih bersifat administratif dan kurang berbasis pada analisis usaha yang komprehensif. Ketua BUMDes sendiri menegaskan bahwa rencana tahunan mereka hanya mengikuti format standar tanpa adanya proyeksi detail mengenai potensi pasar atau kebutuhan usaha. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Menurut (Terry, 2017), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, maka capaian yang masih parsial menunjukkan efektivitasnya belum maksimal. Senada dengan itu, (Daft, 2007) berpendapat bahwa efektivitas organisasi memerlukan perencanaan strategis yang didukung oleh analisis kebutuhan aktual. Di Desa Boro, meskipun partisipasi sudah ada, instrumen analisis bisnis yang memadai masih minim. Meskipun usaha simpan pinjam telah memberikan manfaat, manfaat tersebut belum merata karena modal yang terbatas dan kurangnya inovasi usaha. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan realitas, berbeda dengan temuan (Pratama & Nugroho, 2022) yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan signifikan pada BUMDes yang mengelola keuangan secara efektif. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari persepsi masyarakat. (Santoso et al. 2021) menyatakan bahwa kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah tolok ukur penting dalam efektivitas keuangan. Kritik masyarakat terhadap kurangnya transparansi laporan keuangan BUMDes Desa Boro menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan belum maksimal, karena tidak hanya menyangkut hasil program, tetapi juga legitimasi publik terhadap prosesnya.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi

Efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes Desa Boro masih menghadapi tantangan besar. Pencatatan manual yang dilakukan dengan buku kas sederhana menimbulkan risiko kesalahan, keterlambatan laporan, dan menyita banyak waktu. Staf administrasi mengakui bahwa laporan sering tertunda karena keterbatasan kemampuan dan metode manual. Menurut (Siagian, 2018), efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana suatu kegiatan efisien jika dapat menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Dalam praktik BUMDes Desa Boro, input berupa dana dan tenaga sudah tersedia, tetapi output berupa keuntungan usaha belum optimal. Bahkan sebagian modal terpakai untuk biaya administrasi, bukan untuk memperbesar usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Utami, 2020) yang menyatakan bahwa salah satu indikator efisiensi adalah kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Boro sering terjadi selisih antara rencana dengan realisasi, khususnya pada pengeluaran operasional. Salah satu penyebab rendahnya efisiensi adalah keterbatasan pemanfaatan teknologi. Padahal, penelitian (Nuraini & Mahmud, 2025) menunjukkan bahwa

digitalisasi desa dapat menekan biaya operasional, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan akurasi data. Fakta bahwa aplikasi Siskeudes belum dimanfaatkan optimal di Boro memperkuat pernyataan (**Hidayat, 2023**) bahwa banyak desa belum mengoptimalkan teknologi karena keterbatasan literasi digital dan sarana infrastruktur. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa efisiensi hanya dapat tercapai jika ada kombinasi antara keterampilan SDM, disiplin pengawasan anggaran, dan penerapan teknologi digital. Tanpa kombinasi ini, pengelolaan keuangan cenderung boros dan kurang akurat.

Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya

Hambatan utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Boro bersumber dari tiga aspek, yaitu pencatatan manual, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan lemahnya transparansi. Staf administrasi mengakui bahwa kurangnya latar belakang akuntansi menyebabkan laporan keuangan sering terlambat dan tidak sesuai standar. Selain itu, Kepala Desa menegaskan bahwa minimnya infrastruktur teknologi membuat implementasi pencatatan digital menjadi sulit. Hambatan-hambatan ini sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas BUMDes. Lemahnya transparansi juga menjadi masalah serius. Menurut (**Fahmi & Arifin, 2020**), transparansi adalah kunci akuntabilitas keuangan desa. Di Desa Boro, laporan keuangan yang jarang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat telah menurunkan tingkat kepercayaan publik. Selain itu, ketiadaan pelatihan bagi pengurus menyebabkan mereka hanya mengandalkan pengalaman, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sering tidak sesuai dengan standar akuntansi sederhana. Hal ini sejalan dengan pernyataan (**Wibowo & Rahayu, 2021**) yang menegaskan bahwa pelatihan manajemen keuangan dan digitalisasi merupakan faktor penentu profesionalisme pengurus BUMDes.

Terakhir, kurangnya instrumen pengawasan yang memadai juga menjadi hambatan. Meskipun organisasi kecil sering mengandalkan pengawasan langsung, (**Handoko, 2016**) menjelaskan bahwa seiring kompleksitasnya, diperlukan sistem kontrol yang lebih formal. BUMDes di Desa Boro masih mengandalkan pengawasan informal, yang rentan terhadap konflik kepentingan dan penyimpangan anggaran.

Upaya Perbaikan dan Strategi Penguatan Tata Kelola

Meskipun masih menghadapi hambatan, seluruh informan menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Ketua BUMDes menekankan pentingnya menyusun rencana keuangan yang lebih detail dan berbasis analisis usaha. Ketua BPD mengusulkan adanya skala prioritas pengeluaran dan pengawasan kas yang lebih ketat untuk mencegah pemborosan. Langkah strategis ini sejalan dengan pandangan (**Susanti & Yuliana, 2022**) bahwa efektivitas dan efisiensi dapat dicapai melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan yang disiplin. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan juga menjadi kebutuhan mendesak. Kepala desa menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana teknologi. Hal ini sejalan dengan (**Saputra & Lestari, 2021**) yang menekankan pentingnya kesiapan SDM dan budaya kerja terbuka terhadap perubahan dalam reformasi birokrasi desa. Dari sisi teknologi, pemanfaatan aplikasi akuntansi sederhana atau Siskeudes menjadi solusi utama. (**Rahman & Putri, 2023**) menyatakan bahwa transformasi digital di desa akan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Jika hal ini dapat diterapkan di Desa Boro, maka keuangan BUMDes akan lebih akuntabel dan dipercaya masyarakat. Secara keseluruhan, strategi perbaikan ini mendukung pandangan (**Syafrudin et al. 2023**) yang menyatakan bahwa tata kelola keuangan yang baik akan menghasilkan BUMDes yang mandiri, transparan, dan berdaya saing. Dengan dukungan pelatihan, digitalisasi, dan penguatan transparansi, BUMDes Desa Boro berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, telah diupayakan dengan baik melalui musyawarah desa dan program yang relevan, efektivitas dan efisiensinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu: perencanaan yang masih bersifat administratif, efisiensi anggaran yang rendah akibat selisih antara rencana dan realisasi, keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, transparansi laporan keuangan yang belum terwujud sepenuhnya menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Meskipun demikian, temuan ini juga menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh pengurus dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan. Upaya strategis ke depan, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, digitalisasi sistem keuangan, dan penguatan transparansi publik, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih profesional dan akuntabel di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Boro.

- Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan. Pengurus BUMDes perlu menyusun perencanaan keuangan yang lebih strategis, tidak hanya mengikuti format administrasi formal, tetapi juga berbasis pada analisis usaha yang mendalam, kebutuhan masyarakat, dan potensi lokal. Dengan perencanaan yang matang, setiap alokasi dana akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.
- Peningkatan Kapasitas dan Digitalisasi. Penting untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus BUMDes melalui pelatihan manajemen keuangan, akuntansi sederhana, dan literasi digital. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Siskeudes atau aplikasi akuntansi sederhana juga sangat disarankan. Pemerintah desa dapat mendukung upaya ini dengan menyediakan sarana komputer dan akses internet.
- Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan. Transparansi harus ditingkatkan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin di media informasi desa atau media digital. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini krusial untuk mencegah pemborosan dan penyimpangan anggaran.

Pengembangan Usaha dan Peningkatan Kemanfaatan. BUMDes tidak hanya berfokus pada unit simpan pinjam, tetapi juga harus mengembangkan unit usaha yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini akan membantu memperluas layanan ekonomi dan memastikan manfaat BUMDes dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Referensi

- Amelia, F., Hamdani, & Juniar Asrid. (2024). Determinan Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis TataKelola Organisasi yang Baik. *YUME : Journal of Management*, 7(2), 639-646.
- Anwar et al. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Keuangan BUM Desa - Khoirul A , Rachmawati K , Sangrila P D. 9(1), 61-80.
- Daft, R. L. (2007). *Essential Organization Theory and Design* Licensed to : iChapters User (Issue January).
- Fahmi, I., & Arifin, Z. (2020). *Manajemen Keuangan Publik: Transparansi dan Akuntabilitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah Agung. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*, 4, 41-49.

- Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta Mia. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 211-221.
- Haris, A., & Muhtar, M. (2022). Transparansi Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 112-121.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, R. (2023). Digitalisasi Tata Kelola Desa: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55-67.
- Jihan dkk. (2025). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3(3), 746-757. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.4401>
- Kusumawati Nugrahini, Martinda LestariDini, & Ika Sari Gema. (2025). Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 2025-2026.
- Mahmudi, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraini & Mahmud. (2025). Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Transisi dari Akuntansi Manual Pada BUMDes Kantor Desa Bara. *YUME: Journal of Management*, 8(2), 325-331.
- Putri, L., & Kurniawan, A. (2022). Tantangan BUMDes dalam Mewujudkan Tata Kelola Modern. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 6(2), 88-99.
- Pratama, A., & Nugroho, B. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(1), 45-58.
- Rahman, F., & Putri, A. (2023). Transformasi Digital dalam Penguatan Akuntabilitas Desa. *Jurnal Administrasi Desa*, 5(1), 23-35.
- Renita, R., Dewi, D. K., & Irwan, M. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi). *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v5i1.3251>
- Rijani, M., Munawarah, M., & Mahdalina, M. (2024). Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1, 214-223.
- Santoso, D., Wijaya, H., & Lestari, I. (2021). Kepuasan Stakeholder sebagai Indikator Efektivitas Keuangan Publik. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 10(3), 77-90.
- Setiawan, R., Yuniarti, S., & Hapsari, T. (2020). Kapasitas SDM dan Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan Desa*, 5(2), 60-74.
- Saputra, M., & Lestari, D. (2021). Reformasi Birokrasi Desa dan Kesiapan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 132-145.
- Salman. (2024). Digitalisasi birokrasi: efisiensi pelayanan di disdukcapil sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 62-69. <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.268>.
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanti, E., & Yuliana, R. (2022). Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 99-110.
- Suharyanto, A., Fitria, D., & Kusuma, H. (2024). Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi Kerja Aparatur Desa. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 7(1), 33-45.
- Syafrudin, M., Hakim, R., & Fadilah, S. (2023). Tata Kelola Keuangan Desa untuk Mewujudkan Kemandirian dan Transparansi. *Jurnal Pembangunan dan Masyarakat Desa*, 11(1), 15-27.
- Tazam, M., & Safitri, E. (2024). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Kemajuan Pelayanan Publik Dan Ekonomi Desa. *Karaton : Jurnal Pembangunan Sumenep*, 3(2), 182-193.
- Terry, G. R. (2017). *Principles of Management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.

- Utami, S. (2020). Efisiensi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(2), 44–56.
- Wibowo, A., & Rahayu, M. (2021). Profesionalisme Pengurus BUMDes dalam Era Digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Desa dan Inovasi*, 3(1), 70–82.
- Yulianti, R., & Mahmud, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Keuangan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 4(2), 99–108.